

BAB V

KESIMPULAN

Secara sosial-ekonomi, ada dua kemungkinan faktor utama sebab-sebab terjadi krisis pangan yang berdampak langsung maupun tidak langsung bagi Blitar Selatan pada awal tahun 1960-an, saat inflasi melanda bangsa ini. Yaitu, pertama, faktor permainan pasar oleh spekulasi-spekulasi yang senantiasa menindas kelompok-kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Kedua, lebih disebabkan oleh faktor alam yaitu kemarau panjang dan hama tikus (1962-1963) yang membuat pasar dalam negeri menjadi langka untuk barang-barang kebutuhan pokok. Meskipun upaya impor terus dilakukan oleh pemerintah, namun barang-barang pokok harganya terus membumbung tinggi.

Kedua faktor utama di atas, tidak dapat dipisahkan dari hubungan luar negeri Indonesia-AS yang waktu itu sempat menegang. Yaitu terjadinya embargo ekonomi oleh AS dengan cara tidak dicairkannya hutang Indonesia dari IMF, juga diberhentikannya impor beras dari AS ke Indonesia. Faktor luar negeri ini semakin mengacaukan kehidupan ekonomi Indonesia yang sebelumnya sudah terpuruk.

Tingkat penghidupan ekonomi mayoritas penduduk desa menjadi lebih buruk dan miskin. Hampir sebagian besar dari mereka, tidak cukup mampu membeli bahan pangan, khususnya beras dan jagung. Pada saat-saat tertentu, mereka bahkan tidak sanggup mengonsumsi bahan pangan pengganti yang kualitas dan nilai gizinya lebih

rendah, seperti gapek, bulgur, dan makanan sejenisnya. Namun, ketidakmampuan ini bukan berarti masyarakat pedesaan, khususnya Blitar Selatan, menjadi *apatis* dan kehilangan semangat hidup. Sebagaimana masyarakat agraris pada umumnya, terutama yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional, sebagian besar dari kehidupannya sangat tergantung dengan alam. Beras dan jagung justru bukan menjadi makanan utama, tetapi singkong atau gapek yang menjadi makanan utama sehari-hari sekaligus menjadi makanan tradisional masyarakatnya.

Dengan demikian, sebesar apapun tekanan inflasi yang terjadi, masyarakat petani tidak mengalami kesulitan hidup yang berarti. Di sini, ekonomi *subsistens* berlaku, hasil alam pun tidak dikomersialkan. Prinsip masyarakat setempat waktu itu hanya “bagaimana alam dapat memenuhi kebutuhan perutnya sehari-hari”. Namun, ketika terjadi kemarau panjang, hujan salah musim, dan juga merajalelanya tikus yang menghabiskan tanaman pangan, maka masyarakat Blitar Selatan beserta pemerintahan setempat tidak mampu berbuat banyak. Dalam kondisi perekonomian yang serba sulit dan serba krisis ini, ditambah dengan situasi alam yang tidak menguntungkan, biasanya masyarakat mampu untuk *survive*, berubah menjadi sangat terpuruk. Sehingga bahaya kelaparan massal pun muncul kesekian kalinya di kota PETA ini. Upaya mengatasi bencana kelaparan tersebut telah dilakukan pemerintah daerah, yang rata-rata adalah anggota PKI. Di antara usaha-usaha yang paling tidak populer yaitu memakan daging tikus.

Sehubungan dengan faktor-faktor di atas, khususnya kehidupan ekonomi masyarakatnya, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama PKI melakukan

come back-nya di Blitar Selatan yaitu karena masyarakatnya mayoritas petani miskin. Sedangkan ciri khas petani kecil atau miskin yaitu jiwa sosialnya tinggi dan kerukunannya mantap. Atas dasar itu, PKI selalu mendengungkan keberpihakannya kepada rakyat miskin atau lemah.

Oleh sebab itu, jika PKI berada di daerah petani yang miskin, maka mereka beranggapan bahwa mereka berada di daerah yang memihaknya, dan sudah barang tentu tafsirannya aman. Namun kenyataannya di tahun 1968 tidak sesuai dengan apa yang diduga, melihat kedatangan pembesar-pembesar PKI ke Blitar Selatan, masyarakat awam atau pribumi tidak ada yang mengerti ataupun tahu, siapa dia? dan apa maksud kedatangannya?. Hal ini di luar dugaan pihak PKI sebab meskipun rata-rata tingkat kebudayaan mereka sangat rendah dan sebagian besar dari rakyat masih buta huruf, dalam kondisi yang tidak jelas “mana kawan dan mana lawan”, mereka hanya memiliki dasar filsafat “*Pokok Slamet*” (asal selamat). Mereka tidak memperdulikan siapapun yang memimpin mereka, baik ABRI maupun PKI, yang penting mereka selamat. Di belanan dunia manapun, ciri khas rakyat kecil (*grass root*) yang sedang diperebutkan (dalam hal ini, oleh pihak PKI ataupun ABRI), dasar filsafat tersebut selalu lebih dominan.

Sebagai partai politik yang memiliki jaringan internasional dan yang melandaskan gerakan politiknya pada basis perekonomian, PKI seakan tidak mampu berbuat banyak bahkan terkesan kurang memahami bencana ekonomi yang menimpa bangsanya. Tidak berlebihan, jika dikatakan bahwa PKI, khususnya selama dekade 1960-an hanya dapat bersikap *political oriented*, dalam arti meskipun ada upaya-

upaya penyelesaian masalah ekonomi, namun ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan simpatik dan dukungan massa. Jika kita amati analisis-analisis ekonomi yang dikeluarkan, baik oleh Front Nasional maupun Aidit selaku wakil ketua MPRS waktu itu, kurang memahami bahwa inflasi bukan hanya permasalahan siapa menindas siapa sebagaimana seringkali diperjuangkan PKI demi kaum buruh dan kaum tani. Akan tetapi permasalahan yang lebih vital ada pada sifat dasar manusia pada umumnya bangsa ini, khususnya pada periode 1960-an, yaitu sifat serakah dan rakus. Artinya, ada kecenderungan waktu itu bahwa bencana ekonomi, inflasi, dan larang pangan khususnya, timbul ketika sebagian besar kelompok-kelompok dalam masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya. Dengan perkataan lain yakni merasa selalu kurang dan tidak pernah merasa cukup.

Sedangkan solusi PKI untuk membela kaum tani dengan cara penerapan UUPA-UUPBH secara radikal, khususnya di Jawa Timur, ternyata mustahil diterapkan di Blitar Selatan. Hal ini lebih disebabkan karena begitu kuatnya sistem kekeluargaan di sana, di samping juga tidak banyaknya tanah yang subur sehingga hampir jarang ditemukan adanya penindasan atas dasar tanah.

Rakyat Blitar Selatan hingga upaya *come back*-nya PKI tetap dalam genggamannya PKI. Kader-kader PKI di tempat itu masih tetap utuh, dan letaknya yang jauh dari pusat alat-alat kekuasaan negara atau ABRI, serta banyaknya bromocorah ulung yang sejak dahulu telah mereka kuasai itu, memang menguntungkan sekali bagi pembangunan kembali PKI. Oleh sebab itu, kendati opini nasional tentang PKI semakin buruk dan diperkirakan PKI paska G30S tidak lagi mempunyai kekuatan

massa apalagi kekuatan senjata untuk melawan ABRI, namun kenyataannya PKI benar-benar melakukan perlawanan terhadap kehadiran ABRI di Blitar Selatan. Cara-cara politik dan militeristik yang dilakukan di Blitar Selatan antara lain: membentuk KKM, MKTBP, slogan 3T, pembentukan sekolah-sekolah perlawanan rakyat, membuat ruba-ruba, membuat jaringan radio khususnya informasi dari RRC, bahkan sampai adanya penyelundupan senjata-senjata api yang didatangkan dari RRC, yang diperkirakan ke semua metode tersebut tidak jauh bertentangan dengan konsep Mao Ze Dong yaitu "PKI jaya dari desa kepong kota".

Secara politik, untuk terus meminta keberpihakan rakyat terhadapnya, PKI justru berani mengajarkan teori dan konsep Marxisme-Leninisme-dan Maois secara dogmatis. Ajaran-ajaran yang masih merasuk kuat dalam alam pikir masyarakat Blitar Selatan hingga kini, khususnya generasi tuanya, yaitu pemikiran Materialisme – Dialektika – Historis (M.D.H.) dan konsep perlawanan kaum tani yaitu "Dari Desa Kepung Kota". Padahal, berdasarkan AD/ART terbaru PKI tahun 1962, menyebutkan bahwa ajaran tersebut hanya wajib bagi anggota PKI, tidak dapat diajarkan kepada masyarakat umum. Jadi bagi masyarakat Blitar Selatan hal ini adalah pengecualian.

Oleh karena itu, usaha keras jika ABRI berhasil menumpas keberadaan PKI di Blitar Selatan karena selain ABRI sebelumnya kurang begitu mengenal medan Blitar Selatan yang bergelombang, ABRI juga harus melakukan perubahan revolusioner terhadap alam pikir rakyat kecil yang selama Orde Lama telah berkenalan dengan ideologi komunis-sosialis. Adapun operasi militer yang dilancarkan ABRI disebut sebagai Operasi Trisula, yang pelaksanaannya melalui beberapa tahap, mulai dari

Operasi Intelijen, Operasi Teritorial, hingga Operasi Tempur atau Operasi Jagar Betis. Kendati demikian, usaha-usaha ABRI tersebut ternyata membabi buta sehingga tercipta suasana di mana antar sesama masyarakat dapat saling bunuh. Karena sangat tidak jelas, antara mana kawan - mana lawan, mana yang berpihak kepada PKI dan mana yang berpihak kepada ABRI. Terlebih untuk mengimbangi perlawanan PKI secara fisik, ABRI juga tidak segan-segan membunuh rakyat kecil yang *notebene* hanya ikut-ikutan.

DAFTAR PUSTAKA